

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar belakang.....	1
I.2. Landasan hukum	2
I.3. Maksud dan tujuan	3
I.4. Sistematika penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU	6
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Periode 2018-2023	6
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat.....	11
II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat.....	14
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2020	15
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	20
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	22
III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	22
III.2. Tujuan, dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat.....	22
III.3. Program dan Kegiatan.....	23
BAB IV PENUTUP	28

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Sampai dengan Tahun 2019 Kabupaten Sidenreng Rappang.....	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang.....	13
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Sidenreng Rappang.....	16
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020.....	21
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Sidenreng Rappang.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan lembaga pengawas internal yang berkewajiban mengawal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan. Inspektorat mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya telah disusun perencanaan 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten.

Selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Penyusunan Renja wajib dilaksanakan bagi SKPD untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisiensi, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Renja SKPD yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD.

I. 2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang;

I.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kinerja Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program-programnya.

Dengan tersedianya seluruh informasi diatas dalam Rencana Kerja maka diharapkan Dokumen Rencana Kerja ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber-sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2020 ini juga terdapat informasi-informasi yang akan memudahkan Inspektorat Kabupaten dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan.

I.4. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Kerja ini memuat Program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang. Sistematika penyajian Rencana Kerja Tahun 2020 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

I.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkasan tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan

dokumen RKPD, Renstra SKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

I.3. Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Inspektorat Tahun 2020.

I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat Kabupaten serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2018 dan Capaian RENSTRA Inspektorat Periode 2018-2023

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Inspektorat Kabupaten Tahun 2018 dan perkiraan pencapaian tahun 2019, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Inspektorat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Inspektorat Kabupaten tahun-tahun sebelumnya.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian Visi, dan Misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan,

formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

II.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

Bab III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan Tugas pokok, dan Fungsi Inspektorat Kabupaten.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Inspektorat Kabupaten.

III.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Bab IV : PENUTUP

Berisikan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindaklanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2018 dan Capaian RENSTRA Inspektorat Periode 2018-2023

Inspektorat Kabupaten pada tahun 2018 telah melaksanakan 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan prioritas yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap masing-masing program tersebut telah dievaluasi dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi baik anggaran maupun capaian indikatornya, dengan hasil sebagai berikut :

II.1.1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Dengan anggaran sebesar Rp.732.546.500.00; realisasi anggaran sebesar Rp. 341.554.600.00 atau 46.63 %. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, indikator output kegiatannya adalah :
 - Laporan Hasil Pengawasan (LHP), capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan atas target adalah sebesar 82.61%.
- b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, indikator output kegiatannya adalah :
 - Tertanganinya kasus pengaduan masyarakat, capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan atas target adalah sebesar 100%.
- c. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH, indikator output kegiatannya adalah :
 - Laporan monev, reuiu dan pengawasan lainnya, capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan atas target adalah sebesar 78,57%.
- d. Inventarisasi temuan pengawasan, indikator output kegiatannya adalah :

- Laporan inventarisasi temuan pengawasan, capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan atas target adalah sebesar 0.00%.
- e. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, indikator output kegiatannya adalah :
 - Laporan monitoring tlhp, capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan atas target adalah sebesar 0.00%.

II.1.2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Dengan anggaran sebesar Rp. 122.500.000.00; realisasi anggaran 95.415.000.00 atau sebesar 77.89 %, Indikator programnya adalah : Cakupan aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi dibidangnya Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, indikator output kegiatannya adalah :
 - Pegawai yang mengikuti diklat pembentukan/ penjenjangan sertifikasi JFT, capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan atas target adalah sebesar 50%.
- b. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja, indikator output kegiatannya adalah :
 - Pegawai yang mengikuti pelatihan / bimtek, capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan atas target adalah sebesar 120.00%.

Berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2018 diketahui bahwa capaian kinerja sebesar 79,18% dengan capaian realisasi keuangan senilai 66.74%.

Selanjutnya kaitan antara realisasi program dan kegiatan Renja tahun-tahun sebelumnya dengan pencapaian target Renstra SKPD *dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :*

Tabel 2.1
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra Inspektorat s/d Tahun 2019
Kabupaten Sidenreng Rappang**

SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Target kinerja hasil program dan kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program / kegiatan Renja SKPD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program / Kegiatan SKPD s/d Tahun berjalan 2019	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.06	Urusan Penunjang Pengawasan									
4.06.01	Inspektorat									
4.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	90%					90%		
	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai dan dokumen yang terkirim	1966 lembar		460	83	18,04	337	420	21,36
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bln		12	12	100,00	12	24	40,00
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jasa jaminan milik daerah yang disediakan	60 bln		12	12	100,00	12	24	40,00
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	102 unit		18	15	83,33	18	33	32,35
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	60 bln		12	12	100,00	12	24	40,00
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60 bln		12	12	100,00	12	24	40,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	62 unit		0	0	0,00	14	14	22,58
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	20 exemplar		0	0	0,00	5	5	25,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	356 kali		60	51	85,00	70	121	33,99
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	60 kali		10	0	0,00	10	10	16,67
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	60 bln		12	12	100,00	12	24	40,00
4.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase aset dalam kondisi baik	85%					85%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program / kegiatan Renja SKPD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program / Kegiatan SKPD s/d Tahun berjalan 2019	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 unit		0	0	0,00	0	0	0,00
	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Peralatan gedung kantor	42 unit		6	5	83,33	51	56	133,33
	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor	141 unit		6	5	83,33	51	56	39,72
	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	51 unit		14	4	28,57	0	4	7,84
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	5 unit		1	1	100,00	1	2	40,00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	102 unit		18	12	66,67	18	30	29,41
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	86 unit		19	24	126,32	15	39	45,35
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	3 unit		-	-	0,00	-	-	0,00
4.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% keterpenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan kinerja yang tepat waktu	100%					100%		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja & keuangan	25 lap		5	5	100,00	5	10	40,00
4.06.01.15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan KDH	Persentase Maturitas SPIP Peringkat Daerah level 2 keatas	42%					31%		
	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pelaksanaan money, reviu dan pengawasan lainnya	119 laporan		14	11	78,57	26	37	31,09
	Penanganan Kasus Pengaduan Di lingkungan Pemda	Pengaduan yang ditindaklanjuti	25 kasus		5	5	100,00	5	10	40,00
	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Pelaksanaan kegiatan inventarisasi temuan pengawasan	5 laporan		1	0	0,00	1	1	20,00
	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Pelaksanaan kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	10 laporan		1	0	0	1	1	10,00
	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Laporan hasil pemeriksaan	138 LHP		23	19	82,61	35	54	39,13

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target kinerja program dan kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program / kegiatan Renja SKPD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program / Kegiatan SKPD s/d Tahun berjalan 2019	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.06.01.16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Penawasan	Cakupan aparatur yg mendapatkan pelatihan kompetensi dibidangnya	82%				8=(7/6)	59%	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Penawasan	Pegawai yang mengikuti diklat sertifikasi JFT	20 org		2	1	0	4	5	25,00
	Pelatihan Tekhnis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Pegawai yang mengikuti pelatihan / bimtek	181 org		10	12	120	15	27	14,92

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2019, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten sebagai berikut :

1. Kualitas dan jumlah SDM aparatur pengawasan yang masih dirasa kurang khususnya fungsional auditor/P2UPD sedangkan ruang lingkup pengawasan semakin luas.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan.
3. Terbatasnya anggaran pengawasan.

Strategi pemecahan masalah yang akan ditempuh oleh Inspektorat Kabupaten pada tahun mendatang, yaitu :

1. Mengajukan rekrutmen pegawai melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawasan melalui berbagai pelatihan/diklat baik yang diselenggarakan secara internal maupun yang diselenggarakan oleh instansi terkait sehingga terbentuk aparatur pengawasan yang tangguh, handal dan profesional.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Mengatasi masalah keterbatasan anggaran ditetapkan skala prioritas dalam penetapan kegiatan. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang paling menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Inspektorat Kabupaten melaksanakan sistem pengawasan intern pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran pengawasan yang meliputi seluruh pegawai dan SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang serta seluruh program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Sidenreng Rappang. Ruang lingkup PKPT terdiri pemeriksaan (audit), monitoring,

evaluasi, dan review. Selain itu, Inspektorat Kabupaten juga menetapkan kegiatan Non PKPT untuk melakukan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan Non PKPT antara lain terdiri dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah dan kepatuhan perundang-undangan, penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP Fungsional dan BPK RI, serta koordinasi pengawasan secara komprehensif.

Khusus untuk Inspektorat Kabupaten sampai dengan saat ini belum ada Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum, maupun IKK. Oleh karena itu Inspektorat Kabupaten menentukan sendiri tolak ukur kinerja serta indikator kinerja lainnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat serta Norma dan standar pelayanan Inspektorat Kabupaten yang secara umum merujuk pada Kementerian PAN dan RB, BPKP maupun APIP lainnya. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten *dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :*

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Sidenreng Rappang

NO.	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian Tahun			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut temuan BPK			86%	88%	90%	91%	87%	88%	90%	91%			
2	Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus / Pengaduan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
3	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan SAKIP dengan kategori "BAIK"			24%	22%	28%	33%	12%	22%	28%	33%			
4	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah			2	2	3	3	2	2	3	3			
5	Level Kapabilitas APIP			2	2	3	3	3	3	3	3			

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Perubahan sistem manajemen pemerintahan daerah dan perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah memberikan perubahan paradigma tugas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten selaku APIP. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menekankan arti pentingnya sistem pengawasan intern dalam rangka penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah berdasarkan prinsip good governance.

Sejalan dengan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pentingnya sistem pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai tujuan otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Isu strategis pembinaan dan pengawasan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang belum dapat diselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi kesinambungan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu strategis ditetapkan melalui pengkajian atas permasalahan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Inspektorat Kabupaten merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan peningkatan pelayanan publik dari masyarakat.
2. Tuntutan kepada perangkat daerah untuk meningkatkan pelaksanaan implementasi SAKIP.
3. Tuntutan adaptasi dan penerapan kemajuan teknologi informasi dilingkungan kerja.
4. Tuntutan peningkatan kapabilitas APIP.
5. Tuntutan peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan

dan pemberantasan korupsi.

6. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan Misi Bupati Sidenreng Rappang serta Visi dan Misi Inspektorat Daerah khususnya.

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang diselaraskan dengan Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 yaitu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, inventarisasi temuan pengawasan dan tindaklanjut hasil temuan pengawasan, Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur, pengawas dengan kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan apartur pengawasan dan anggaran disesuaikan dengan plafon pagu indikatif yang ada pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Analisis kebutuhan Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten *dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :*

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2020
Kabupaten Sidenreng Rappang

SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No.	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	90%	1.062.170	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran	90%	1.062.170	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	Materai dan dokumen yang terkirim	420 Materai	1.900	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	Materai dan dokumen yang terkirim	420 Materai	1.900	
	Penyediaan jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Inspektorat	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	68.400	Penyediaan jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Inspektorat	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	68.400	
	Jasa Jaminan barang Milik Daerah	Inspektorat	Jasa jaminan milik daerah yang disediakan	12 bulan	20.000	Jasa Jaminan barang Milik Daerah	Inspektorat	Jasa jaminan milik daerah yang disediakan	12 bulan	20.000	
	Jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional	Inspektorat	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	19 unit	11.500	Jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional	Inspektorat	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	19 unit	11.500	
	Jasa Administrasi Keuangan	Inspektorat	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	121.470	Jasa Administrasi Keuangan	Inspektorat	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	121.470	
	Jasa kebersihan kantor	Inspektorat	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	29.500	Jasa kebersihan kantor	Inspektorat	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	29.500	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Inspektorat	Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	14 Unit	28.500	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Inspektorat	Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	14 Unit	28.500	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Inspektorat	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 Exp	7.650	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Inspektorat	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 Exp	7.650	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rapat Koordinasi Luar Daerah	Inspektorat	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70 kali	400.000	Rapat Koordinasi Luar Daerah	Inspektorat	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70 kali	400.000	
	Rapat Koordinasi dalam daerah	Inspektorat	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	10 kali	10.000	Rapat Koordinasi dalam daerah	Inspektorat	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	10 kali	10.000	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Inspektorat	Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	363.250	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Inspektorat	Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	363.250	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana		Persentase aset dalam kondisi baik	85%	1.843.557	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana		Persentase aset dalam kondisi baik	85%	1.843.557	
	Pembangunan Gedung Kantor	Inspektorat	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 unit	1.250.000	Pembangunan Gedung Kantor	Inspektorat	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 unit	1.250.000	
	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Inspektorat	Perlengkapan gedung kantor	12 unit	83.000	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Inspektorat	Perlengkapan gedung kantor	12 unit	83.000	
	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Inspektorat	Peralatan gedung kantor	21 unit	220.000	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Inspektorat	Peralatan gedung kantor	21 unit	220.000	
	Pengadaan mebeleur	Inspektorat	Jumlah mebeleur yang diadakan	15 unit	55.257	Pengadaan mebeleur	Inspektorat	Jumlah mebeleur yang diadakan	15 unit	55.257	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Inspektorat	Pemeliharaan gedung kantor	1 unit	19.600	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Inspektorat	Pemeliharaan gedung kantor	1 unit	19.600	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Inspektorat	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	19 unit	131.500	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Inspektorat	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	19 unit	131.500	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Inspektorat	Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	20 unit	18.500	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Inspektorat	Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	20 unit	18.500	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Inspektorat	Jumlah Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	1 unit	65.700	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung	Inspektorat	Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	1 unit	65.700	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		% Keterpenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan kinerja	100%	31.900	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		% Keterpenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan kinerja	100%	31.900	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Inspektorat	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja & keuangan	5 Lap	31.900	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Inspektorat	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja & keuangan	5 Lap	31.900	
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan KDH		Persentase Maturitas SPIP Peringkat Daerah level 2 keatas	31%	2.117.591	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan KDH		Persentase Maturitas SPIP Peringkat Daerah level 2 keatas	31%	2.117.591	
	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Skpd / Unit kerja	Pelaksanaan monev, reuiu dan pengawasan lainnya	20 Laporan	929.226	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Skpd / Unit kerja	Pelaksanaan monev, reuiu dan pengawasan lainnya	20 Laporan	929.226	
	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemda	Pemkab Sidrap	Pengaduan yang ditindaklanjuti	5 kasus	124.712	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemda	Pemkab Sidrap	Pengaduan yang ditindaklanjuti	5 kasus	124.712	
	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Inspektorat	Pelaksanaan kegiatan inventarisasi temuan pengawasan	1 laporan	57.202	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Inspektorat	Pelaksanaan kegiatan inventarisasi temuan pengawasan	1 laporan	57.202	
	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Skpd / Unit kerja	Pelaksanaan kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	2 laporan	73.639	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Skpd / Unit kerja	Pelaksanaan kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	2 laporan	73.639	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Skpd / Unit kerja	Laporan hasil pemeriksaan	23 laporan	932.812	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Skpd / Unit kerja	Laporan hasil pemeriksaan	23 laporan	932.812	
5	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		Cakupan aparatur yg mendapatkan pelatihan kompetensi dibidangnya	59%	529.450	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur		Cakupan aparatur yg mendapatkan pelatihan kompetensi dibidangnya	59%	529.450	
	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	Lembaga Diklat K/L/D	Pegawai yang mengikuti diklat pembentukan/ penjurangan sertifikasi JFT	4 orang	135.650	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	Lembaga Diklat K/L/D	Pegawai yang mengikuti diklat sertifikasi JFT	4 orang	135.650	
	Pelatihan Tekhnis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Lembaga Diklat K/L/D	Pegawai yang mengikuti pelatihan / bimtek	35 orang	393.800	Pelatihan Tekhnis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Lembaga Diklat K/L/D	Pegawai yang mengikuti pelatihan / bimtek	35 orang	393.800	
Jumlah					5.584.668					5.584.668	

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Kabupaten belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stakeholders. Hal ini *dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :*

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1		3	4	5	6 Tidak ada program/kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan masyarakat dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat khususnya pada tugas-tugas di Bidang Pengawasan/pemeriksaan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat Kabupaten adalah INPRES Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, oleh karena itu secara tidak langsung Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Inspektorat Kabupaten akan mendukung keberhasilan INPRES tersebut.

Sampai dengan saat ini belum ada lagi Kebijakan-kebijakan Nasional mengenai kepengawasan, sehingga kami pun belum merubah Program dan Kegiatan sebagaimana telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Periode 2018-2023.

III.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten

Sebelum dirumuskan tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja ini, terlebih dahulu kami akan mengungkapkan kembali Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten yang tercantum dalam Rencana Strategis Periode 2018-2023 sebagai berikut :

III.2.1 Tujuan

Berikut Tujuan Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasan Internal dalam mendorong peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

III.2.2 Sasaran

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu satu tahunan maka Inspektorat Daerah menjabarkannya dalam suatu sasaran, yang mencakup :

1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk Rencana Kerja Tahun 2019 kami belum dapat melakukan evaluasi progress pencapaian tujuan dan sasaran dikarenakan realisasi pencapaian kinerja pada tahun ini masih berlangsung, selain itu kami pun tidak melakukan penyesuaian target dikarenakan belum adanya perubahan kebijakan pengawasan ditingkat nasional.

III.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan terhadap pencapaian kinerja tahun 2020 terbagi dalam 2 program dan 7 kegiatan prioritas. Program dan Kegiatan prioritas inilah yang lebih banyak mendukung pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Tahun 2020. Program dan Kegiatan prioritas tersebut yaitu :

III.3.1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH, terdiri dari :

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
2. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
3. Penanganan Kasus Pengaduan Di lingkungan Pemda
4. Inventarisasi Temuan Pengawasan
5. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

III.3.2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, terdiri dari :

1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
2. Pelatihan Tekhnis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.

Sejalan dengan program prioritas yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2018 - 2023 juga didukung dengan program dan kegiatan penunjang yaitu :

III.3.3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

4. Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
8. Pelayanan Administrasi Perkantoran
9. Penyediaan bahan bacaan dan Per Undang-Undangan
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
11. Penyediaan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor.
12. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
13. Rapat-Rapat Koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke Dalam Daerah.

III.3.4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari :

1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Meubeleir
3. Pengadaan Peralatan kantor.
4. Pengadaan Perlengkapan kantor.
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional.

III.3.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
2. Penilaian Angka Kredit JFA.

Rumusan rencana program dan kegiatan *dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :*

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2020
Dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Sidenreng Rappang

SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	RENCANA TAHUN 2020			Cat. Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 06 01	Urusan Penunjang Pengawasan Inspektorat								
4 06 01 01	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		90%	1.062.170,000		90%		1.158.920,000
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan dokumen yang terkirim	Inspektorat	420 Materai	1.900,000	APBD	420 Materai		2.700,000
02	Penyediaan jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Inspektorat	12 bulan	68.400,000	APBD	12 bulan		76.400,000
05	Jasa Jaminan barang Milik Daerah	Jasa jaminan milik daerah yang disediakan	Inspektorat	12 bulan	20.000,000	APBD	12 bulan		30.000,000
06	Jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	Inspektorat	19 unit	11.500,000	APBD	21 unit		22.450,000
07	Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	Inspektorat	12 bulan	121.470,000	APBD	12 bulan		121.470,000
08	Jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Inspektorat	12 bulan	29.500,000	APBD	12 bulan		29.500,000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Inspektorat	14 Unit	28.500,000	APBD	14 unit		68.500,000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Inspektorat	5 Exp	7.650,000	APBD	5 exp		7.650,000
18	Rapat Koordinasi Luar Daerah	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	K/L/D	70 kali	400.000,000	APBD	70 kali		425.000,000
17	Rapat Koordinasi dalam daerah	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten Sidrap	10 kali	10.000,000	APBD	10 kali		12.000,000
20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	Inspektorat	12 bulan	363.250,000	APBD	12 bulan		363.250,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	RENCANA TAHUN 2020				Cat. Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 06 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase aset dalam kondisi baik		85%	1.843.557,000			85%	948.760,000
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Inspektorat	1 unit	1.250.000,000	APBD		0	-
	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor	Inspektorat	12 unit	83.000,000	APBD		15 unit	143.000,000
	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor	Inspektorat	21 unit	220.000,000	APBD		25 unit	312.000,000
	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	Inspektorat	15 unit	55.257,000	APBD		18 unit	143.760,000
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Inspektorat	1 unit	19.600,000	APBD		1 unit	39.600,000
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Inspektorat	19 unit	131.500,000	APBD		21 unit	121.400,000
28	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Inspektorat	20 unit	18.500,000	APBD		20 unit	20.500,000
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	Inspektorat	1 unit	65.700,000	APBD		1 unit	168.500,000
4 06 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% keterpenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan kinerja yang tepat waktu		100%	31.900,000			100%	41.900,000
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja & keuangan	Inspektorat	5 laporan	31.900,000	APBD		5 laporan	41.900,000
4 06 01 15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Pengendalian Kebijakan KDH	Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah level 2 keatas		31%	2.117.591,000			33%	3.327.591,000
01	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pelaksanaan monev, reviu dan pengawasan lainnya	Skpd/Unit Kerja	20 Laporan	929.226,000	APBD		25 laporan	1.459.226,000
09	Penanganan Kasus Pengaduan Di lingkungan Pemda	Pengaduan yang ditindaklanjuti	Pemkab Sidrap	5 kasus	124.712,000	APBD		5 kasus	124.712,000
07	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Pelaksanaan kegiatan inventarisasi temuan pengawasan	Inspektorat	1 laporan	57.202,000	APBD		1 laporan	57.202,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	RENCANA TAHUN 2020				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Cat. Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Pelaksanaan kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Skpd/Unit Kerja	2 laporan	73.639,000	APBD		2 laporan	93.639,000
10	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Laporan hasil pemeriksaan	Skpd/Unit Kerja	23 laporan	932.812,000	APBD		30 laporan	1.592.812,000
4 06 01 16	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Cakupan aparatur yg mendapatkan pelatihan kompetensi dibidangnya		59%	529.450,000			67%	635.450,000
01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pegawai yang mengikuti diklat sertifikasi JFT	Lembaga Diklat K/L/D	4 orang	135.650,000	APBD		4 orang	201.650,000
02	Pelatihan Tekhnis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Pegawai yang mengikuti pelatihan / bimtek	Lembaga Diklat K/L/D	35 orang	393.800,000	APBD		35 orang	433.800,000
		JUMLAH			5.584.668,000				6.112.621,000

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2020 disusun sebagai dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun meliputi program dan kegiatan yang didalamnya menggambarkan target capaian kinerja dan rencana kinerja anggaran.

Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar untuk perencanaan yang lebih atas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Semoga Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah dibidang pengawasan.

Selanjutnya bahwa Renja yang disusun ini jauh dari sempurna, maka dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang. Semoga Rencana Kerja tahun 2020 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene Sidenreng, 9 Agustus 2019

PI. INSPEKTUR DAERAH

SUDIRMAN BUNGLI, S.IP, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP. 19700827 199009 1 002